



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
=====

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia, di mana pemilih akan melakukan pencoblosan surat suara secara bersamaan baik untuk Presiden/Wakil Presiden, maupun DPR RI/DPD RI, dan DPRD Provinsi/Kab/Kota. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Berbagai pendapat menunjukkan bahwa praktik pemilu serentak tersebut akan berlangsung tidak mudah, penuh tantangan, dan berpotensi mengalami banyak persoalan. Di antara tantangan yang akan dihadapi adalah adanya praktik pemilu yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya baik dari segi teknis pelaksanaan, situasi politik, kondisi sosial masyarakat, dan pola-pola kampanye yang akan menghasilkan potensi kerawanan pada variasi dan tingkatan yang berbeda pula.

Beberapa waktu yang lalu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilu 2019. Dalam rilis tersebut ada empat hal yang perlu diwaspadai dalam Pemilu 2019 yakni *Potensi kerawanan keamanan*, *Potensi kerawanan netralitas PNS*, *Potensi yang harus diwaspadai, ialah maraknya ujaran kebencian atau SARA dan Potensi terjadinya politik uang*.

Menyadari kondisi tersebut peran aparat penegak hukum sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap penyelenggara Pemilu dari potensi tindak kekerasan; memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan mandiri terutama atas kekerasan fisik terhadap pemilih; serta memastikan netralitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Pemilu.

Komisi III DPR RI memandang perlu untuk mencari masukan dan sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait kesiapan aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 (baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden) sehingga dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Komisi III DPR RI dalam kunjungan spesifik ini melakukan pertemuan dengan mitra kerja yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kanwil Kumham, KPUD dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk memperoleh keterangan sebagaimana berikut :

A. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

- a. Meminta penjelasan terkait perencanaan dan kesiapan Polda Kalimantan Barat dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di masyarakat menjelang Pemilu serentak bulan April 2019.
- b. Meminta penjelasan terkait penanganan kasus-kasus Pemilu yang melibatkan orang asing di wilayah Polda Kalimantan Barat.

B. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat

- a. Meminta penjelasan sejauh mana kesiapan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat dalam mengoptimalkan peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses Pemilu serentak bulan April 2019 yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Meminta penjelasan terkait perkara-perkara yang menonjol terkait Pemilu di lingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

C. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat

- a. Meminta penjelasan mengenai warga negara asing yang memiliki Kartu Tanda Penduduk untuk warga negara Asing akan tetapi terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2019.
- b. Koordinasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan penyelenggara pemilu terkait permasalahan Daftar Pemilih di Lembaga Pemasarakatan dan upaya penyelesaiannya.

D. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Meminta penjelasan terkait kesiapan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, ketersediaan dan distribusi logistik, pemungutan dan perhitungan suara.

E. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Bawaslu untuk mencegah serta menindak pelanggaran Pemilu, diantaranya pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye, netralitas ASN, ujaran kebencian dan SARA serta politik uang

III. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 April 2019

Tempat : Mapolda Kalimantan Barat

IV. TIM KUNJUNGAN

No	Nama	Keterangan
1	Erma Suryani Ranik, SH	Ketua Tim/ F. P. Demokrat
2	Drs. Erwin TPL. Tobing	Anggota Tim/ F. PDIP
3	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH., M.Si	Anggota Tim/ F. P. Golkar
4	Wihadi Wiyanto, SH., MH.	Anggota Tim/ F. Gerindra
5	Ir. H. Mulyadi	Anggota Tim/ F. P. Demokrat
6	Dr. H.M. Anwar Rachman, SH., MH.	Anggota Tim/ F. PKB
7	Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE.	Anggota Tim/ F. PKS
8	H. Arsul Sani, SH., M.Si	Anggota Tim/ F. PPP
9	Drs. Y. Jacki Uly, MH.	Anggota Tim/ F.P. Nasdem

V. HASIL KUNJUNGAN

Dari kunjungan dan pertemuan yang dilaksanakan, beberapa hal yang dijelaskan dan mendapatkan perhatian dari mitra rapat adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
 - Jumlah penduduk Kalbar adalah 5.442.814 jiwa.
 - Kesiapan Polda Kalbar dalam melakukan pengamanan Pemilu Pilpres dan Pileg termasuk langkah-langkah mengantisipasi kerawanan pemilu yang sudah dilakukan antara lain melibatkan Polri dan TNI Pam Pemilu sebanyak 11.656 personel.
 - Langkah-langkah lain yang telah dilakukan adalah : Apel Gelar Pasukan “Ops Mantap Brata Kapuas 2018”, Latpraops “Mantap Brata Kapuas 2019”, Simulasi Sispankota, Patroli Cipta Kondisi Pemilu 2019, Cipkon di pusat belanja dan keramaian, cyber patrol, pembinaan komunitas, himbuan kamtibmas, Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019, Deklarasi Pileg dan pilpres Tahun 2019, Kalbar Bershalawat, Apel Kesiapan Pengawasan Pemilu 2019 dan berbagai kegiatan lainnya.
 - Telah disiapkan sebanyak 1.891 personel keseluruhan Polres dan Polresta untuk melakukan patroli baik melalui darat, udara, dan air.
 - Belum ada kasus-kasus pemilu yang melibatkan WNA. Saat ini telah melakukan penanganan terhadap 18 kasus dengan catatan 1 kasus sudah dilakukan proses penyidikan dan masuk Tahap II yang ditangani Sentra Gakkumdu Singkawang dan 13 kasus sudah dihentikan setelah ada klarifikasi, serta 4 kasus masih dalam proses penyidikan dan klarifikasi di Sentra Gakkumdu.
2. Kejaksaaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat.
 - Kesiapan Kejaksaaan Kalbar tidak hanya kesiapan personil saja, bidang Pidum dalam Gakkumdu, bidang Intelijen dalam melakukan pengawasan termasuk penyadapan apabila diperlukan, dan bidang Datun terhadap pengawasan sengketa-sengketa hasil Pemilu.
 - Melakukan pembahasan kajian dan sharing pendapat dengan Bawaslu, kajian pembahasan terhadap temuan pelanggaran Pemilu.
 - Terhadap temuan pelanggaran Pemilu di Kalbar 1 temuan pelanggaran sudah masuk ke Pengadilan dan 13 temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.
 - Eksekusi perkara *in absentia* sudah mengantisipasi terhadap perkara yang masuk walaupun belum pernah terjadi di Kalbar.

- Tantangan dan permasalahan yang dihadapi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait penanganan perkara tindak pidana pemilu, antara lain: tenaga jaksa yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu tidak mencukupi jumlah, tidak tersedianya anggaran khusus penanganan perkara tindak pidana Pemilu di DIPA Kejaksaan tahun anggaran 2019.
3. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat.
- Terkait dengan Pilpres dan Pileg 2019 untuk penyelenggaraan dan penyediaan TPS pada masing-masing Rutan sudah berjalan dan berkoordinasi dengan KPU.
 - Total Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Provinsi Kalimantan Barat 76 orang dengan jumlah pemegang e-KTP sebanyak 2 orang.
 - Sehubungan terdapatnya 1 Warga Negara Asing pemegang e-KTP yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melalui Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang telah melakukan koordinasi dengan KPUD Ketapang dan sudah dilakukan penghapusan data WNA tersebut dari Daftar Pemilih Tetap
 - Data terakhir jumlah penghuni per-UPT per 22 Maret 2019 dengan total tahanan berjumlah 1.472 dan napi sebanyak 3.897 orang diseluruh Lapas dan Rutan Kalimantan Barat.
 - Jumlah penghuni Lapas yang merupakan DPT adalah sebanyak 676 orang dan masih ada sekitar 270 orang belum terdaftar sebagai DPT.
 - Masih menerima titipan tahanan dari Polsek dan Polres sehingga data di Rutan Pontianak selalu bergerak. Jumlah TPS di Rutan Pontianak adalah sebanyak 2 TPS.
4. KPUD Provinsi Kalimantan Barat.
- KPU sudah melaksanakan berbagai upaya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku termasuk dalam pemuktahiran data pemilih bertujuan untuk melindungi hak pilih. Pemuktahiran data pemilih di Kalbar berlangsung cukup lama, jumlah pemilih di Kalbar sebanyak 3.687.609 pemilih dengan jumlah TPS di Provinsi Kalbar adalah sebanyak 16.510 TPS bertambah sebanyak 40 TPS setelah 4 kali penetapan.
 - DPK adalah masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT, untuk menjamin ketersediaan logistik bagi DPK maka mengusulkan untuk memasukkan kedalam DPT adalah dengan dorongan rekomendasi dari Bawaslu. Jumlah DPK yang belum masuk dalam DPT berjumlah 7.456 orang.
 - DPTP dari dalam Kalbar keluar Kalbar sebanyak 20.017 orang dan yang dari luar Kalbar ke Kalbar yang berjumlah 22.830 orang.
 - Terkait pencalonan di Kalbar ada 570 kursi yang akan diperebutkan oleh 6.960 Caleg, dan di Provinsi hanya ada sekitar 800 Caleg.
 - Kalbar mendapat surat suara tepat waktu, walau tidak datang serentak langsung didistribusikan. Seluruh surat suara sudah sampai di semua Dapil dan melalui tahap penyortiran untuk dilihat apakah ada yang rusak dan apakah sudah mencukupi.
 - Saat ini tahapan Pemilu memasuki masa kampanye sejak tanggal 24 April, kemudian akan menetapkan jumlah petugas TPS dan menyiapkan saksi sesuai dengan jumlah panel yang melakukan rekap. Rekap Kecamatan dilakukan selama 17 hari, kemudian di Rekap Kabupaten dilakukan pada tanggal 24 April hingga 1 Mei 2019.

- Mengapresiasi Kepolisian terkait pengamanan dan pengawalan surat suara sehingga bisa terdistribusikan dengan baik.
5. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
- Bawaslu Provinsi sudah diberikan anggaran yang cukup untuk melakukan pengawasan hingga TPS. Saat ini sedang melakukan pelantikan pengawas TPS sebanyak 16.510 orang, saat ini masih ada kekurangan pengawas TPS sebanyak 612 orang sebab terhalang persyaratan usia minimal 25 dan minimal berijazah SMA. TPS Sanggau dan Kapuas Hulu masih belum memiliki pengawas TPS yang memenuhi syarat.
 - Bawaslu memiliki kewenangan penyelesaian sengketa terhadap Keputusan KPU dalam dua bentuk yaitu keputusan dan kesepakatan.
 - Penanganan pelanggaran ada tiga jenis yaitu pelanggaran administrasi, pidana, dan etika. Terhadap 70 temuan sejauh ini yang masuk kedalam kategori pelanggaran pidana berjumlah 15 sengketa.
 - Terkait pencegahan telah melakukan Bintek hingga pengawas TPS dengan memberikan pemahaman terkait pengawasan termasuk distribusi logistik serta akan melakukan patroli pada 3 hari tenang setelah masa kampanye.
 - Bawaslu juga harus menjaga integritas dan memiliki perluasan kewenangan penanganan pelanggaran etika penyelenggara AdHoc yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Bawaslu.
 - Mengapresiasi kerjasama yang solid dengan Kepolisian dan Kejaksaan didalam Gakkumdu.

VI. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

KOMISI III DPR RI